

PEMBELOTAN MASYARAKAT KOREA UTARA KE KOREA SELATAN DIBAWAH KEPEMIMPINAN KIM JONG UN TAHUN 2011-2018

Oleh Siti Rizki Ananda

20150510307

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
siti.rizki.2015@fisipol.umy.ac.id

ABSTRACT

This research tries to analyze some factors which caused the defection by some North Korean citizen to South Korea under the leadership of Kim Jong Un. Recently, North Korea regime has implemented a tighter sanctions and punishments toward its citizen under Kim Jong Un leadership, even though the phenomena of the defection which was developed by a border-crossing activity is now still exist along 2011-2018. By using the analyzing of the Push-Pull Factors of Ernst Ravenstein, the writer sees that factors that are influencing the phenomena of the defection under the Kim Jon Un leadership years of 2011-2018 has never been existed before. As a result, this research has found that the main motivation or cause of the defection under the Kim Jong Un leadership are Fear and Freedom. Both of the main causes have contributed towards Pull and Push Factors of the North Korean citizens to perform the defection to South Korea on the year of 2011-2018 under Kim Jon Un leadership.

Keywords: Korean Peninsula, Kim Jon Ung, North Korean Defector, South Korea Resettlement Policy, Push-Pull Factors, North Korean Human Rights, Songbun System

Pendahuluan

Fenomena migrasi dalam 2 dekade terakhir ini tidak hanya di dominasi oleh migrasi yang terjadi secara regular atau formal. Konflik, perang dan bencana alam telah mendorong peristiwa migrasi terjadi secara *irregular*. Di Semenanjung Korea fenomena *border-crossing* mengawali terjadi kegiatan perpindahan masyarakat Korea Utara ke Korea selatan. Perpindahan tersebut hingga saat ini kita kenal dengan pembelotan. Fenomena penyeberangan batas negara atau *border-crossing* oleh masyarakat Korea Utara ini menimbulkan beberapa perdebatan dalam penggunaan istilahnya. Masyarakat Korea Utara yang menyeberang ke Korea Selatan mulanya hanya disebut sebagai *border-crosser*. Fenomena perpindahan yang mulanya disebut *border-crossing* di Semenanjung Korea ini telah memiliki beberapa perubahan istilah atau definisi secara kondisional.

Dalam penelitian ini penulis akan merujuk pada penggunaan istilah '*political defector*' atau pembelot untuk masyarakat Korea Utara yang menyeberang ke Korea Selatan. Hal ini karena penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Korea Utara secara internal dan eksternal untuk menyeberang ke Korea Selatan pada masa kepemimpinan Kim Jong Un berdasarkan

pada kondisi politik dan hak asasi masyarakat Korea Utara yang memutuskan untuk menyeberang atau membelot.

Tulisan ini memberikan pemaparan mengenai fenomena pembelotan yang terjadi dalam lingkup pemerintahan Korea Utara yang semakin keras dan propaganda yang semakin mengakar. Walaupun karakteristik kepemimpinan Kim Jong Un yang semakin namun tidak menghentikan fenomena pembelotan masyarakat Korea Utara ke Korea Selatan. Lebih jauh tulisan ini juga menceritakan perjalanan dan proses yang dihadapi oleh pembelot Korea Utara mulai dari kebijakan, respon hingga fasilitas yang akan didapati dinegara tujuan yaitu Korea Selatan.

Literature Review

Push – Pull Factors

Push-pull Factors ini merupakan sebuah teori dalam studi migrasi yang pertama kali di deskripsikan oleh Ernst Ravenstein tahun 1876 dalam penelitiannya “*Laws of Migration*”. Setelah itu beberapa peneliti telah memodifikasi dan mengembangkan teori ini yang mana dalam kasus pembelotan masyarakat Korea Utara ini penulis akan menggunakan model *Push and Pull Factors* dengan tujuan menganalisa faktor - faktor yang mempengaruhi keputusan migrasi seorang individu atau komunitas masyarakat sebagai berikut (Lee, 1966):

- Faktor-faktor yang terkait dengan daerah asal
- Faktor –faktor yang terkait dengan daerah tujuan
- Adanya pengaruh hambatan dan tantangan
- Faktor individual

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh migran di wilayah lingkungan yang baru seperti asimilasi atau upaya transisi dengan sistem dan kebiasaan yang baru ternyata berbanding terbalik namun perbandingan faktor positif dan negatif yang nantinya akan menjadi pertimbangan lebih jauh bagi para migran untuk migrasi (Wickramasinghe & Wimalaratana, Fall 2016).



Push Factor ditentukan oleh beberapa alasan yang timbul dan terjadi di daerah asal para migran (Lee, 1966). Sedangkan *Pull Factors* merupakan alasan yang mempengaruhi individu atau sekelompok masyarakat dengan ketertarikannya untuk menuju suatu wilayah atau negara tujuan (Wickramasinghe & Wimalaratana, Fall 2016).

Beberapa faktor seperti perang, revolusi politik dan konflik kekerasan yang mendorong orang untuk melarikan diri dari penganiayaan politik atau kebebasan beragama yang termasuk dalam alasan politik. Alasan lingkungan berupa bencana alam yang menghancurkan wilayahnya termasuk krisis kelaparan yang membuat individu atau masyarakatnya terdorong untuk mencari

keselamatan di lingkungan yang lebih stabil, selain itu juga alasan sosial yang berupa kualitas ekonomi yang kurang yang mendorong individu atau masyarakat untuk mencari capaian standar kehidupan yang lebih baik dan mencari peluang pendidikan dan fasilitas kesehatan.

Kemiskinan (*Poverty*) merupakan hal utama yang mendorong suatu komunitas masyarakat untuk berpindah dari negaranya (Wickramasinghe & Wimalaratana, Fall 2016). Kemiskinan membawa suatu masyarakat kepada situasi ekonomi yang mengancam keberlangsungan kehidupannya. Oleh karena alasan tersebut mencari wilayah lain untuk bertahan hidup merupakan alternatif.

Ketakutan (*Fear*) merupakan salah satu yang mendorong suatu komunitas masyarakat untuk pergi dari negaranya. Ketakutan yang timbul di negaranya dapat berupa ketakutan akan cara kepemimpinan suatu rezim, ketakutan terhadap sanksi hukum yang diterapkan oleh rezim atau pemerintah, dan ketakutan terhadap ancaman – ancaman politik dalam suatu rezim atau pemerintahan (Wickramasinghe & Wimalaratana, Fall 2016).

Bencana alam (*Disasters*) merupakan faktor tak terduga yang terjadi dalam suatu negara. Dengan adanya faktor ini menimbulkan sejumlah kerusakan ataupun kehilangan yang memaksa warga masyarakat suatu negara untuk pindah wilayah yang lebih aman dan nyaman (Wickramasinghe & Wimalaratana, Fall 2016). Di Korea Utara bencana alam seperti kekeringan yang berkepanjangan (*Great Famine*) terjadi dalam waktu yang lama hingga menyebabkan angka kematian yang tinggi. Kekeringan yang menyebabkan kelaparan mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat Korea Utara pada saat itu.

Tingkat pengangguran (*unemployment*) adalah faktor yang mendorong masyarakat untuk berpindah dari segi ekonomi. Situasi sumber daya manusia yang tidak berkembang hingga mendorong masyarakat untuk pindah ke wilayah lain.

Fenomena pembelotan masyarakat Korea Utara ini adalah dampak buruk dari adanya perubahan geopolitik di era pasca Perang Dingin. Perang yang menimbulkan ancaman bagi masyarakat Korea Utara mengharuskan mereka untuk pindah ke wilayah lain. Penurunan yang drastis dalam dukungan Soviet dan Cina hingga awal 1990-an mengakibatkan penurunan sistem ekonomi hingga mempersulit situasi ekonomi di Korea Utara.

Selain perang dan krisis ekonomi, kemunculan pasar ilegal atau disebut dengan *Bottom Up Marketization* setelah masa krisis juga menjadi suatu dorongan. Pasar menjadi sumber makanan utama bagi masyarakat Korea Utara sekaligus sumber ketahanan selama di Korea Utara, begitu pula dengan pola pikir pasar laba dan untung yang mendorong pembelotan masyarakat Korea Utara (LiNK, 2018).

Faktor selanjutnya merupakan mengakarnya kegiatan suap dan korupsi disebabkan oleh kemunculan kegiatan ekonomi baru secara ilegal. Selain itu juga pembatasan dan tindakan keras yang mendorong kegiatan pasar menjadi sumber utama ketahanan hidup, sosial maupun ekonomi masyarakat Korea Utara.

Selain itu faktor-faktor seperti meningkatnya tuntutan untuk bertahan hidup dengan terlibat dalam kegiatan pasar secara ilegal di perbatasan, meningkatnya jumlah kaum elit yang mampu mengakses dunia luar sedikit lebih mudah, dan meningkatnya arus perjalanan atau perpindahan sejak masa perang (LiNK, 2018).

Dalam penulisannya, penulis mengklasifikasikan faktor politik dan ekonomi. Pengklasifikasian ini ditujukan agar mengetahui dengan jelas faktor – faktor pembelotan pada masa kepemimpinan Kim Jong Un. Sejumlah fenomena terbaru terjadi di masa kepemimpinan Kim Jong Un yang melatarbelakangi kegiatan pembelotan selama 8- 10 tahun terakhir.

Beberapa faktor mempengaruhi ketertarikan individu atau sekelompok masyarakat untuk pergi ke suatu wilayah atau negara tujuan seperti faktor lingkungan, sosial, ekonomi, dan juga faktor politik (Ramos, 2017). Keamanan (*Safety*) merupakan keadaan yang utamanya dicari oleh pembelot. Situasi dalam negeri terkadang tidak berpihak terhadap masyarakat bahkan hingga timbul ancaman – ancaman berbahaya. Selain karena itu keamana yang dicari juga karena situasi negara yang sedang dalam keadaan konflik atau perang. Peluang (*Opportunity*) merupakan faktor tarikan lainnya yang menyebabkan adanya pembelotan (Ramos, 2017). Hal ini terjadi karena situasi ekonomi maupun politik dalam negeri yang tidak memihak pada rakyat. Kebebasan (*Freedom*) merupakan faktor yang sangat penting yang menarik suatu komunitas masyarakat untuk pindah ke wilayah lain. Kebebasan yang tidak didapatkan sepenuhnya di negara asal sehingga mengekang hak – hak dasar warga negara (Ramos, 2017).

Dalam kasus pembelotan masyarakat Korea Utara yang melarikan diri dari wilayah asal untuk mencari keamanan pribadi, kebebasan sebagai individu, peluang dalam memperoleh pekerjaan, mobilitas, pendidikan, dan stabilitas di negara tujuan yang merupakan Korea Selatan. Dalam kasus pembelotan masyarakat Korea Utara, Korea Selatan sebagai negara tujuan utama masyarakat Korea Utara untuk membelot memberikan bantuan melalui *Resettlement Program* serta perlindungan bagi masyarakat Korea Utara di Selatan (Choi, 2018). Korea Selatan memiliki beberapa alasan yang menarik pembelot Korea Utara untuk pergi ke Korea Selatan (Choi, 2018), beberapa diantaranya merupakan keberadaan infrastruktur yang menghasilkan fasilitas dan pelayanan yang lebih memadai, akses kesehatan dan medis yang lebih mudah, stabilitas demokrasi, kesempatan pekerjaan dan pendidikan, dan tentunya akses terhadap budaya dan hiburan yang lebih terbuka dan bebas (Ramos, 2017).

Berdasarkan pada grafik yang dibuat oleh Lee dalam penelitiannya pada tahun 1966 mendeskripsikan penyebab migrasi, faktor - faktor lingkungan, sosial, ekonomi dan politik yang menarik individu atau masyarakat (*pull*) seperti keamanan dan perlindungan, peluang, stabilitas, dan kebebasan yang akan diperoleh ketika pergi ke suatu tujuan di luar wilayah asalnya. Faktor - faktor pendorong individu atau masyarakat (*push*) seperti kemiskinan, bencana alam, pengangguran, dan ketakutan terhadap rezim yang mengharuskan mereka mencari tempat baru atau wilayah yang lebih aman dan tepat. (Lee, 1966)

Kehidupan sehari-hari masyarakat Korea Utara merupakan perjuangan menghindari hukum rezim dan bertahan hidup dari serba kekurangan selama beberapa dekade (Chang, Heggard, & Noland, 2008). Pertimbangan para pembelot untuk meninggalkan Korea Utara disebabkan oleh berbagai alasan dan faktor pendorong yang berkaitan situasi politik dan ekonomi Korea Utara khususnya pada masa kepemimpinan Kim Jong Un.

Perang dan Bencana Alam

Pembagian wilayah Semenanjung Korea secara garis besar disebabkan oleh intervensi dua kekuatan blok besar. Wilayah utara diduduki oleh kekuatan komunis Uni Soviet dan wilayah Selatan oleh liberalis Amerika. Oleh karena pendudukan tersebut tak jarang masyarakat semenanjung pada saat itu melakukan perpindahan lintas batas atau disebut juga dengan *border-crossing* dari utara ke selatan maupun selatan ke utara. Perpindahan yang dilakukan karena sebagian masyarakat yang tidak mendukung ideologi komunis Uni Soviet ataupun sebaliknya.

Sejak Perang Dunia II Uni Soviet telah menduduki wilayah Utara dan Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memiliki pos – pos militer di wilayah Selatan. Oleh karena dorongan atas dua kekuatan besar ini, perang berlanjut hingga memberikan dampak buruk bagi masyarakat seperti penggusuran dan perpindahan warga Semenanjung Korea pada saat itu. Pada tahun 1950 – 1953 terjadi perang antara Korea Utara (*Democratic People's Republic of Korea*) dan Korea Selatan (*Republic of Korea*). Perang yang ditunggangi oleh kepercayaan dan ideologi tersebut menimbulkan sejumlah dampak negatif bagi politik dan sosial kedua negara. Perang Korea merupakan lanjutan dari invasi kekuatan sekutu setelah Perang Dunia II (Chang, Heggard, & Noland, 2008).

Setelah itu pada tahun 1995 - 1998 Korea Utara dilanda bencana alam yaitu kemarau panjang hingga menyebabkan kekeringan panjang. Bencana kemarau panjang yang melanda Korea Utara pada waktu itu memberikan dampak buruk secara berkepanjangan seperti kegagalan pertanian dan kelaparan akut. Kegagalan sistem produksi ini disebabkan oleh keadaan agrikultur yang tidak memungkinkan untuk bercocok tanam disebabkan oleh kekeringan panjang. Disaat yang sama Korea Utara mulai memasuki masa krisis ekonomi diakibatkan oleh kurangnya sumber ekonomi negara dan mengurangnya pemasokan bantuan dari Soviet dan Cina saat itu (Millet, 2019).

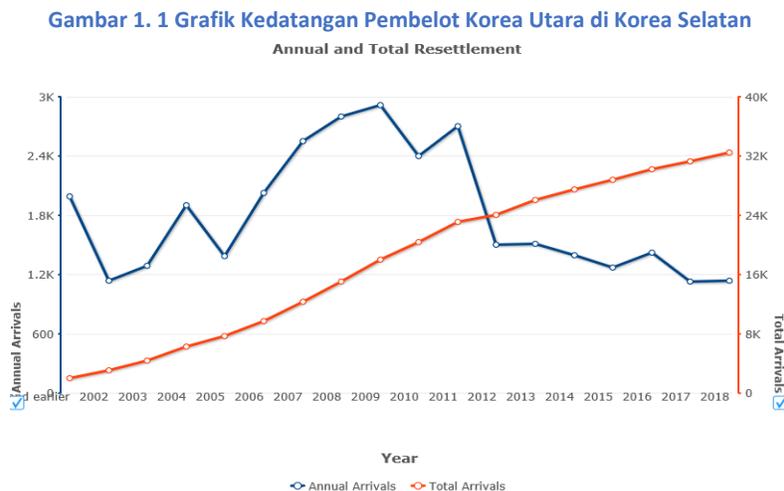
Krisis yang dibarengi dengan kekeringan dan kelaparan secara besar-besaran di Korea Utara ini disebut *Great Famine*, krisis ini menyebabkan kematian sebagian masyarakat Korea Utara hingga mencapai 3 juta jiwa (Kim S. H., 2012). Mulai dari jumlah produksi pertanian yang berkurang, penjualan hasil tani yang semakin menurun, dan terlebih situasi ekonomi negara yang tidak stabil. Masyarakat Korea Utara secara tidak langsung berinisiatif untuk mencari alternatif untuk bertahan hidup.

Peristiwa tersebut menyebabkan banyak warga Korea Utara yang melintasi perbatasan Cina untuk mencari pasokan makanan dengan kondisi pengawasan perbatasan yang tidak begitu ketat, sebanyak 140,000 hingga 200,000 orang Korea Utara telah berada di Cina pada saat itu (Chung B.-H. , 2014). Hal ini menjadi pemicu munculnya perpindahan atau kegiatan *border-crossing* oleh masyarakat Korea Utara secara signifikan. Peningkatan jumlah pembelotan terjadi secara drastis ke Korea Selatan. Kenaikan secara signifikan mulai dari 50 – 63 orang sebelum 1990-an menjadi 488 orang pada kisaran tahun 1995 sampai memasuki tahun 2000-an terutama pada saat terjadinya *Great Famine* yang melanda Korea Utara mencapai angka ribuan (Choi, 2018).

Menurut pendataan pada *Ministry of Unification*, Park Byeong-Seung melihat bahwa skala kedatangan pembelot hingga tahun 2011 mencapai angka 2,400-an pembelot yang kemudian menurun 45% - 50% dalam kurun waktu 9 tahun terakhir yaitu dengan kedatangan sebanyak 1,127 pembelot tahun 2017 dan 1,137 pembelot pada tahun 2018 (Byeong-Seung, 2018).

Berdasarkan pada laporan beberapa organisasi kemanusiaan seperti *Liberty to North Korea (LiNK)* atau *Life Funds for North Korean Refugees*, menyatakan jumlah keseluruhan masyarakat Korea Utara yang telah melakukan penyeberangan sejak berakhirnya Perang Korea hingga saat ini hampir mencapai 300,000 orang (Team L. , 2019). Korea Selatan hingga kini memiliki jumlah pembelot terbesar sebanyak 32,477 per tahun 2018 dan terakhir sebanyak 229 orang per Maret 2019 (MOU, 2019) .

Adanya penurunan jumlah angka pembelotan ke Korea Selatan secara perlahan terjadi sejak awal pemerintahan Kim Jong Un. Fenomena pembelotan masyarakat Korea Utara terus terjadi secara konsisten. Adanya perkembangan – perkembangan karakter dan akses – akses masyarakat dengan wilayah luar Korea Utara memungkinkan sebab adanya konsistensi angka pembelotan sejak tahun 2011 yang terus ada. Kedatangan pembelot Korea Utara secara regular dalam 9 tahun terakhir menjadikan jumlah pembelot secara keseluruhan menjadi bertambah.



Pada tahun 2011 angka kedatangan pembelot Korea Utara menurun 50% dari kedatangan setiap tahun sebelumnya, *Ministry of Unification* Korea Selatan mencatat jumlah angka yang menurun tersebut namun tetap konsisten kedatangannya hingga Maret tahun 2019. Pada saat Kim Jong Un mengambil alih kepemimpinan negara dan partai, ia secara langsung meningkatkan pengamanan terhadap wilayah perbatasan dan sistem kontrol sosial. Kontrol sosial dan pengawasan di wilayah perbatasan yang semakin ketat menjadikan penyeberangan bagi warga Korea Utara yang ingin membelot lebih sulit.

Komposisi pembelot Korea Utara pada akhir tahun 1990-an hingga awal 2000-an hanya didominasi oleh masyarakat yang memiliki jabatan penting atau tinggi (*high-level defector*). Pembelot Korea Utara tiba dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda seperti mantan diplomat, pengusaha, pejabat pemerintah, dan tentara. Namun seiring dengan terjadinya perubahan situasi politik dan kondisi ekonomi internal Korea Utara, komposisi pembelot Korea Utara mengalami peningkatan variasi latar belakang khususnya dibawah kepemimpinan Kim Jong Un.

Kebijakan Politik Korea Utara dibawah Kepemimpinan Kim Jong Un

Korea Utara merupakan negara sosialis yang menerapkan nilai-nilai tradisional komunisme dan konfusianisme dalam sistem pemerintahannya. Nilai-nilai yang telah didoktrin sejak masa pemerintahan Kim Il-Sung menghasilkan dua pilar ide yang unik (Habib, 2008); yaitu *Juche* sebagai ideologi resmi dan *Kimism* yaitu sekte kepribadian atau karakter Kim Il-Sung. Dua pilar ide ini menjadi dasar – dasar menjalankan kehidupan bagi pemerintahan dan masyarakat di Korea Utara. Karakter dan kepercayaan masyarakat serta pemerintah Korea Utara hingga saat ini berlangsung diatas landasan kedua pilar tersebut.

Juche merupakan ideologi yang menerapkan filosofi kemandirian, survivalisme, dan etnosentrisme pasca-kolonial. Tujuan utama ideologi *Juche* ini adalah untuk mempertahankan ekonomi nasional secara mandiri dan beroperasi di lingkungan yang aman dengan pertahanan yang kuat (Bennett, 2013). Dalam konteksnya ideologi *Juche* berfungsi untuk melegitimasi tujuan tersebut dengan bantuan *The Korean People's Army* (KPA) yang melindungi negara di garda terdepan dari ancaman - ancaman eksternal Korea Utara. Hal ini ditujukan untuk menjaga dan mengontrol pengembangan kegiatan ekonomi internal Korea Utara agar dapat berkembang baik dibawah kepemimpinan rezim. Dengan kata lain ideologi *Juche* menjadi alat pembenaran untuk setiap penerapan keputusan dan kebijakan rezim secara politis.

Terdapat tiga prinsip utama dalam menerapkan ideologi *Juche* di Korea Utara (Baek, 2016), (1) independen secara politik dan ideology dari bangsa lain termasuk Cina dan Rusia, (2) sistem militer yang independen dan pertahanan nasional yang memadai, dan (3) sistem ekonomi yang mandiri dan memadai. Selain itu terdapat pula 10 prinsip praktikal yang diumumkan oleh Kim Il Sung pada tahun 1974 dengan nama "*Ten Principles for the Establishment of a One-Ideology System*". Prinsip tersebut mewajibkan masyarakat untuk menghafalkan dan menerapkan nilai – nilai ideologi *Juche* dalam kehidupan sehari-hari sekaligus mengatur dan mengontrol kehidupan masyarakat Korea Utara.

Sementara '*Kimism*' atau sekte kepribadian seorang Kim Il-Sung merupakan kepercayaan masyarakat Korea Utara terhadap sifat-sifat baik dan agung pemimpin tersebut. Masyarakat Korea Utara yang mengagungkan karakteristik Kim Il-Sung dan setia terhadap ideologi negara mendapatkan hak-hak istimewa sebagai masyarakat di Korea Utara. Karena sikap setia dan kecintaan masyarakat Korea Utara terhadap rezim, beberapa kesempatan seperti bergabung dengan partai nasional dan administrasi pemerintahan Korea Utara, memiliki akses pergerakan yang lebih bebas, akses untuk memilih sekolah yang paling diinginkan di Korea Utara, membentuk suatu birokrasi, dan kepemimpinan militer (Habib, 2008).

Kim Jong Un mengambil alih jalur kepemimpinan keluarga Kim pada tahun 2011 menggantikan pemimpin sebelumnya Kim Jong Il. Sejak saat itu, sistem politik dan struktur lembaga pemerintah mulai sedikit berbeda dari masa pemerintahan sebelumnya di Korea Utara. Sistem yang bekerja dengan baik pada masa kepemimpinan Kim Jong Il masih dianggap relevan dengan kepemimpinan masa Kim Il-Sung seperti penggunaan *xenophobia* dan penggunaan sistem kontrol secara efektif (Coduti, 2016).

Setelah proses inaugurasi sebagai pemimpin partai dan pemimpin negara telah dilaksanakan pada tahun 2012, Kim Jong Un memutuskan untuk menghilangkan beberapa penasihat pribadinya yang ditetapkan pada saat masa transisi pemerintahan. Selain itu Kim Jong Un juga melakukan pergantian personel di setiap bagian dan posisi di pemerintahan barunya. Konfigurasi kekuatan pasca kepemimpinan Kim Jong Il menunjukkan bahwa Kim Jong Un berusaha untuk menetralsir kekuatan dan legitimasi kekuasaannya dengan membersihkan seluruh komponen-komponen yang dianggap anti-partai atau kontra-revolusioner.

Salah satu keputusan politik pada masa kepemimpinan Kim Il-Sung setelah perjanjian gencatan senjata pada juli 1953 adalah menangkap dan mengadili dua belas anggota terkemuka dari *Domestic Communist Group* atas tuduhan pengkhianatan (Harden B. , 2010). Semua dari mereka dituduh sebagai mata-mata dalam pengkajian "*American Imperialist*," melakukan pembunuhan sewenang-wenang terhadap personel 'patriotik' untuk melindungi kedok mereka, dan berkonspirasi untuk menggulingkan rezim Kim Il-Sung. Sepuluh terdakwa dihukum mati dan segera dieksekusi, sementara dua lainnya menerima hukuman penjara yang lama.

Pada tahun 2013, Jang Song-Taek dieksekusi atas perintah Kim Jong-Un karena dituduh menyebarkan tindakan revolusioner terhadap negara. Jang Song-Taek yang merupakan paman mertua Kim Jong-Un dan pejabat tinggi dari *Korean Workers' Party* berperan sebagai penasihat kebijakan utama Kim Jong-Un (Sang-Hun, 2017). Dengan menghapus keberadaan Jang Song-Taek dalam struktur pemerintahan dan partai Kim Jong-Un telah menekan dan menghilangkan pengaruh politik yang anti partai dan kontra-revolusioner dari urusan dalam negeri Korea Utara. Maka sejak saat itu Kim Jong-Un memulai masa kepemimpinannya dengan membersihkan segala pengaruh luar dengan melakukan filter orang-orang dalam sistem pemerintahannya.

Kemudian setelah 5 tahun masa kepemimpinannya, Kim Jong Un telah mampu melakukan konsolidasi legitimasi secara internal dan mengamankan posisinya melalui restrukturisasi sistem politik Korea Utara dan penerapan garis pemerintahan. Sejak awal masa pemerintahannya, Kim Jong Un mengemukakan orientasi pemerintahannya terhadap pengembangan nuklir dengan mengadopsi undang – undang baru sekaligus menciptakan organisasi atau lembaga pemerintah baru dengan tugas meningkatkan program senjata nuklir. Tindakan tersebut dilakukan untuk mengamankan negara dari ancaman eksternal ataupun internal.

Hal ini menunjukkan peralihan perhatian oleh pemerintah Korea Utara yang lebih fokus terhadap program pengembangan nuklir daripada pengembangan kesejahteraan masyarakatnya. Program nuklir Korea Utara mampu menjamin kelangsungan politik pemerintahan keluarga Kim sekaligus mendapatkan legitimasi sukseki kepemimpinan secara turun temurun. Selain itu juga mempertahankan independensi negara dan memfasilitasi pembangunan nasional. Walaupun pada akhirnya kebijakan dan sistem pembangunan tidak merata namun tetap menjadikan program nuklir suatu kepentingan bagi keberlangsungan rezim dan menunjang kekuatan rezim di dunia internasional.

Kim jong Un juga meningkatkan peraturan pergerakan masyarakat di wilayah perbatasan Korea Utara. Fenomena *Cross-Border Movement* atau pergerakan lintas batas merupakan suatu kegiatan melintasi wilayah perbatasan oleh masyarakat Korea Utara untuk kepentingan ekonomi. Kegiatan lintas batas ini terjadi di wilayah perbatasan antara Cina dan Korea Utara. Melalui kegiatan lintas-batas ini, masyarakat Korea Utara terlibat dengan adanya perdagangan di wilayah perbatasan bahkan melakukan pekerjaan ilegal untuk mendapatkan uang dan makanan (Chang, Heggard, & Noland, 2008).

Peningkatan tingkat pengamanan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Korea utara merupakan bagian dari keputusan politik. Tindakan yang diambil tersebut secara langsung telah membatasi akses dan kebebasan bergerak bagi masyarakat Korea Utara. Setelah keterbatasan peluang untuk berkembang disebabkan oleh pemberlakuan sistem *Songbun*, masyarakat akan lebih merasa tertekan dan semakin tersisolasi.

Selain itu hal serupa terjadi saat masa operasi kompleks Industri Kaesong di mana rezim mempekerjakan setidaknya tiga organisasi keamanan yang berbeda, dengan personel keamanan dan informan lain saling berhubungan di seluruh militer Korea Utara untuk menangkap dan menghukum setiap warga negara yang berperilaku tidak pantas atau menyimpang dari peraturan (Kay, 2014). Kim Jong Un

juga meningkatkan penguatan peraturan hukum terhadap masyarakat yang melanggar aturan bahkan yang tertangkap melakukan perbuatan ilegal. Beberapa layanan dan ganjaran bagi masyarakat melalui sanksi dan hukuman politik seperti kamp penjara, kekerasan politik oleh penguasa, dan eksekusi publik.

Kebijakan – kebijakan dan system yang diterapkan oleh pemerintahan Korea Utara tersebut menimbulkan beberapa kondisi politik masyarakat yang memprihatinkan sebagai berikut:

Keterbatasan Hak-Hak Dasar Manusia di Korea Utara

Hak – hak dasar manusia sepatutnya didapatkan dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Korea Utara. Hak – hak seperti mendapatkan suplai makanan, hak untuk mengakses media dan informasi, melakukan perjalanan, dan hak untuk mendapatkan pasokan energi dan subsidi ekonomi. Namun di Korea Utara masyarakat sangat diatur dan dibatasi untuk melakukan hal – hal tersebut. Peraturan – peraturan yang tidak memihak terhadap masyarakat menjadikan masyarakat Korea Utara tidak berkembang dan terisolasi. Pemerintah Korea Utara mengatur segala peraturan termasuk peraturan terhadap hak – hak dasar manusia. Sebagai negara komunis yang dipercaya mampu mengelola sistem ekonomi dan mampu memberikan kesejahteraan terhadap rakyat. Korea Utara telah gagal menjalani sistem tersebut dalam segi kesejahteraan masyarakat.

Seperti halnya untuk akses informasi di mana tidak ada media yang independen, yang artinya radio dan TV berada dibawah kontrol stasiun siaran pemerintah. Hanya ada beberapa stasiun TV milik pemerintah, *Korean Workers' Party* memiliki dan mengoperasikan *Korean Central Broadcasting Station*, dan *Voice Korea* yang dikelola negara mengoperasikan layanan siaran eksternal (Agency C. I., 2018). Pemerintah Korea Utara melarang masyarakatnya untuk mendengarkan siaran asing. Oleh karena itu, masyarakat hanya diperbolehkan mendengarkan dan mengakses berita informasi dari produksi pemerintah. Warga negara Korea Utara dilarang belajar atau berkomunikasi dengan dunia di luar Korea Utara. Ini berarti bahwa pemerintah hanya memperbolehkan beberapa situs jaringan informasi yang merupakan bagian dari penyebaran propaganda yang hanya dapat dijelajahi oleh warga Korea Utara, dan pada tahun 2016 beberapa situs yang hanya bisa diakses oleh domain jaringan tertentu mengalami kebocoran dan ini telah memberi pihak luar sedikit pandangan tentang bagaimana kediktatoran rezim Korea Utara, yang dipimpin oleh pemimpin Kim Jong-Un, menampilkan diri mereka kepada publik (Newton, 2016)

Selain itu di Korea Utara, pemerintahnya menerapkan sistem izin melakukan perjalanan. Sistem tersebut berlaku bagi masyarakat Korea Utara maupun bagi orang asing yang akan melakukan perjalanan ke Korea Utara. Namun seiring dengan kegagalan pemerintah Korea Utara dalam menyediakan kebutuhan dasar masyarakatnya, maka aturan perizinan melakukan perjalanan menjadi gagal karena masyarakat melakukan perjalanan secara ilegal untuk mencari sumber makanan ataupun lainnya. Beberapa kondisi yang terjadi dalam masyarakat dalam masyarakat Korea Utara seperti mempertaruhkan penangkapan, pemenjaraan, dan deportasi. Hampir sebanyak satu juta warga Korea Utara menyeberang ke Cina terlebih dahulu untuk menghindari kelaparan, kekurangan ekonomi, dan penindasan politik; (Agency C. I., 2018). Kesadaran masyarakat Korea Utara terhadap keterbatasan hak tersebut secara langsung mendorong sejumlah masyarakat untuk berpindah ke wilayah lain.

Hukuman dan Sanksi Politik di Korea Utara

Korea Utara terkenal dengan penyelenggaraan hukuman rezim seperti eksekusi publik dan hukuman kamp penjara bagi masyarakat Korea Utara yang berbuat salah. Kesalahan – kesalahan yang mendapatkan sanksi hukuman berupa melawan rezim, mengakses informasi dan media asing, hingga

tertangkap melarikan diri atau pembelotan. Dalam masa pemerintahannya dipimpin oleh Kim Jong Un sekarang, pemerintah telah meningkatkan alokasi pemberian hukuman dengan melibatkan satu keluarga sebagai target pemberian hukuman. Kerabat atau anggota keluarga menjadi salah satu target hukuman secara tidak langsung karena mereka telah dianggap sebagai pengkhianat nasional. Meskipun laporan pengaduan hukuman eksekusi telah menurun beberapa tahun ini, pembelot harus siap membayar harga begitu mereka kembali atau semacam denda setelah mendapatkan hukuman (Ko, Chung, & Seok Oh, 2004).

Di Korea Utara rasa takut benar-benar sangat mengontrol perilaku dan tindakan masyarakat Korea Utara. Masyarakat Korea Utara harus berhati-hati dalam bertindak dan menahan untuk tidak melakukan sesuatu yang berarti, baik di masa lalu maupun masa sekarang. Pemikiran dan imajinasi masyarakat mengenai kondisi 're-education camp' atau bahkan penjara yang disebabkan oleh hal-hal yang melanggar aturan kecuali bisa diselesaikan dengan suap, atau hal-hal dengan menagatakan sesuatu yang sedikit politis yang akan dianggap tidak dapat diterima oleh pihak berwenang dan tetangga, takut ditangkap, dan takut keluarga diusir (Baek, 2016) Sebanyak sepuluh ribu orang Korea Utara, termasuk anak-anak, yang ditahan di kamp-kamp penjara melakukan kerja paksa, termasuk penebangan, penambangan, dan pertanian (Turku, 2009). Sebagian besar warga Korea Utara dikirim ke kamp-kamp penjara tanpa proses pengadilan, dan banyak yang meninggal di sana tanpa proses pengadilan, dan banyak yang meninggal di sana tanpa mengetahui tuduhan terhadap mereka.

Akibatnya dari sejumlah personel atau pejabat pemerintah memutuskan untuk membelot terjadi. Hal ini terjadi karena sistem politik dan birokrasi oleh rezim Kim Jong Un yang semakin keras dan ketat. Khususnya saat visi pemerintahan Kim Jong Un yang mencoba untuk melanjutkan revolusioner. Masyarakat khususnya pejabat pemerintah yang menginginkan perubahan yang awalnya mempercayai pemerintah dalam melindungi dan memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi disilusi atau kecewa. Hwang Jang-Yop yang merupakan salah satu orang yang membentuk dan mendefinisikan filosofi politik orang Korea Utara termasuk menyusun prinsip-prinsip praktik *Juche*, memutuskan untuk melepaskan tanggung jawab dari posisinya di Korea Utara dan membelot ke Korea Selatan pada tahun 2012 (Baek, 2016). Selain itu beberapa jumlah personel pemerintahan lainnya seperti tentara dan diplomat.

Thae Yong-ho merupakan mantan seorang diplomat Korea Utara terhadap beberapa negara di Eropa seperti Denmark, Swedia, dan Inggris. Sebagai duta besar atau perwakilan negara Korea Utara, Thae Yong-ho memiliki tugas untuk menghapus kritik dan laporan negatif mengenai hak asasi manusia di Korea Utara. Namun sejak Kim Jong Un mengambil alih kuasa pemerintahan Korea Utara, Thae Yong-ho merasa kecewa dengan orientasi kebijakan politik Kim Jong Un dan kebijakan dalam negerinya (Barron, 2019)

Kondisi Sosial dan Ekonomi Korea Utara dibawah Kepemimpinan Kim Jong Un

Di Korea Utara juga terdapat klasifikasi sistem sosial yang bernama *Songbun System*. Sistem yang dikembangkan pada tahun 1950 digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan kontrol dan pengawasan terhadap populasi masyarakat Korea Utara. Setiap warga negara Korea Utara menjadi bagian salah satu dari tiga tingkatan sistem *Songbun* tersebut. Kategori dalam menetapkan tingkatan sosial warga negara Korea Utara berdasarkan pada loyalitas politiknya terhadap rezim serta latar belakang politik keluarga seseorang warga negara

Tiga kategori tersebut merupakan; (I) kelas utama atau *Core Class* yang terdiri dari individu atau keluarga yang memperjuangkan negara seperti revolusioner, pahlawan, keluarga non-kombatan dan tentara yang gugur pada saat Perang Korea (II) kelas menengah atau *Wavering Class* yang terdiri dari komponen

– komponen warga negara termasuk keluarga dan keturunannya yang mengkhianati negara dan membelot ke negara lain, dan (III) adalah kelas paling bawah atau *Hostile Class* yang terdiri dari warga negara yang mendukung Jepang atau Amerika, masyarakat yang kapitalis, dan mata – mata terhadap negara (Baek, 2016)

Berdasarkan pada keberadaan sistem *Songbun* tersebut memperlihatkan bahwa rezim pemerintah memberlakukan pelayanan – pelayanan tertentu terhadap masing masing warga negara yang termasuk kedalam masing-masing kategori tersebut. Setiap warga negara terpilih seperti yang berada dibawah status *Core Class* memiliki hak istimewa dan kesempatan yang lebih luas sebagai masyarakat baik dalam bidang politik, sosial maupun pendidikan. Sedangkan individu yang berada dalam status *Hostile Class* memiliki kesempatan dan hak yang lebih kecil. Namun bagi sejumlah individu masyarakat tidak menyadari akan pentingnya klasifikasi sistem ini terutama bagi kalangan masyarakat *Hostile Class*. Sementara sistem *Songbun* tersebut terus berlaku, masyarakat Korea Utara tetap hidup dalam lingkungan rezim paling otoriter di dunia. Tanpa membedakan klasifikasi sosial, nilai-nilai ideologi terus disebarkan dan diterapkan dalam lingkungan masyarakat Korea Utara sejak pemerintah *Great Leader* Kim Il-Sung pada tahun 1972. Penerapan nilai ideologi ini dilakukan melalui sistem pendidikan maupun budaya Korea Utara. Kepercayaan dan kepatuhan masyarakat Korea Utara terhadap rezim berlangsung dengan baik hingga pada saat Kim Jong Un mulai memimpin negara tersebut.

Masyarakat Korea Utara yang patuh dan bekerja keras untuk negara awalnya merasa senang dan bangga atas kontribusi yang mereka berikan. Semangat dan kebanggan atas praktik kerja buruh disampaikan melalui kampanye yang disebut *Chollima*¹. Kampanye yang diinisiasikan oleh Kim Il Sung tersebut ditujukan terhadap para buruh yang bekerja untuk negara. Kampanye dilaksanakan untuk memberikan apresiasi dan semangat kepada buruh pekerja yang telah berusaha untuk membantu negara sejak pemerintahan Kim Il Sung. Selain memberikan semangat terhadap kinerja buruh, kampanye tersebut juga menjadi ajang refleksi terhadap jasa – jasa pahlawan pada saat Perang Korea termasuk *Great Leader Kim Il Sung* sebagai teladan bagi masyarakat Korea Utara dalam hal menjaga kesetiaan dan kepercayaan terhadap negara atau rezim.

Namun pada saat masa transisi pemerintah Kim Jong Il ke pemerintahan Kim Jong Un, pemerintah menerbitkan profil klasifikasi sistem sosial masyarakatnya. Bagi beberapa masyarakat yang menyadari keberadaan posisinya dalam sistem *Songbun* tersebut, mereka akhirnya menyadari dan belajar dari keadaan mereka dalam sistem *Songbun*. Beberapa orang yang diprofilkan menyadari akan status mereka yang rendah sebagai warga negara, dan menjadi kecewa dengan kampanye semangat bekerja keras untuk negara dan keluarga. Adanya klasifikasi sistem *Songbun* memberikan dampak seperti meningkatnya tindakan penindasan terhadap masyarakat biasa oleh pejabat pemerintah atau aparaturnegara Korea Utara. Banyak perempuan dan gadis Korea Utara yang terpicak oleh janji subsidi makanan, pekerjaan, dan kebebasan.

¹ Chollima merupakan suatu gerakan kampanye yang dimulai pada masa kepemimpinan Kim Il-Sung untuk menyebarkan nilai-nilai patriotisme melalui gambaran kerja keras para buruh yang membawa kejayaan. Beberapa sebutan oleh Kim Il-Sung untuk meningkatkan semangat Chollima Riders-sebutan bagi para pekerja-pada beberapa siaran pers *Kyoweon Sinmun*-sebuah Koran berita yang dikhususkan untuk pelajar- seperti, “*All over the country, squads of Chollima Workteam competes with the West, the Chollima Riders are the Heroes of the Era and the Red Warriors of the Party,*” dan “*let’s continue to expand the ranks of the Chollima teaching masses.*” (Moody, Peter. “*Remembering North Korea’s Chollima Movement,*” Seoul, September 23rd 2014, NK News.org, <https://www.nknews.org/2014/09/remembering-north-koreas-chollima-movement/>)

Walaupun begitu negara tetap mengatur aturan yang mengharuskan masyarakat untuk terus bekerja keras walaupun dengan rasa kekecewaan (*disillusionment*) terhadap negara dan rezim.

Selain itu untuk menjaga keberlangsungan ideologi dan keagungan pribadi *Great Leader* Kim Il Sung, pemerintah Korea Utara melakukan sosialisasi propaganda yang dirancang untuk mengendalikan pemikiran dan persepsi masyarakat Korea Utara. Propaganda tersebut disebar dengan menggambarkan Korea Utara sebagai negara yang makmur yang diirikan oleh negara-negara lain di dunia (Harden B. , 2010). Masyarakat Korea Utara didoktrinasi secara menyeluruh melalui berbagai pernyataan propaganda dan sistem politik pemerintahan yang sangat tertutup.

Kebijakan *Resettlement* Pembelot Korea Utara di Korea Selatan

Korea Selatan sejak pasca Perang Korea menjadi tujuan utama para pembelot Korea Utara melalui Cina. Selain letaknya di Semenanjung Korea, Korea Selatan dan Korea Utara yang telah terpisah selama hampir 70 tahun memiliki akar kebudayaan yang sama secara tradisional dengan Korea Utara. Oleh karena itu, masyarakat Korea Utara yang membelot akan merasa lebih aman jika pergi ke Korea Utara. Korea Selatan memberlakukan beberapa kebijakan yang mendukung keberadaan dan kedatangan masyarakat Korea Utara sebagai pembelot. Hingga pada akhir 1990-an pembelot yang datang ke Korea Selatan dianggap sebagai pahlawan dengan diberikan penawaran pekerjaan di organisasi pemerintah atau perusahaan milik pemerintah Korea Selatan (Choi, 2018). Penyediaan dukungan oleh pemerintah Korea Selatan ternyata memberikan dampak terhadap motivasi adanya pembelotan dan memberikan bipolarisasi ideologi yang kuat di Semenanjung Korea. Ini berarti bahwa konektivitas akan mudah terjalin walaupun kedua wilayah telah berpisah selama hampir 70 tahun.

Korea Selatan mengakomodasikan semua pengungsi Korea Utara yang tiba di Korea Selatan. Bentuk akomodasi seperti memberikan perlindungan dan menetapkan status hukum pengungsi Korea Utara. Dalam Undang - Undang Korea Selatan mengenai tugas kerja *National Intelligence Service* (NIS) dan *Ministry of Unification* Korea Selatan yaitu pada artikel 1 dalam “*The 1997 Act on the Protection and Settlement Support of Residents Escaping from North,*” menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan, status hukum (*grant citizenship*), pendampingan, dan pendidikan sosial (Choi, 2018). Ketika pengungsi Korea Utara tiba di Korea Selatan, mereka harus menjalani prosedur karantina di sebuah pusat perlindungan dibawah naungan *National Intelligence Service* (NIS) dan *Ministry of Unification*. Dalam pusat perlindungan yang disebut *Hanawon* atau *Settlement Support center for North Korean Refugees*, pengungsi Korea Utara akan menjalani proses filterisasi dan interogasi mengenai latar belakang dan motivasi kedatangan mereka ke Korea Selatan. Setelah melalui proses awal tersebut, pengungsi Korea Utara akan menerima bimbingan atau orientasi program sosial dan pendidikan.

Atas dasar peraturan dalam perundangan tersebut, pembelot Korea Utara mendapatkan status sebagai pengungsi di Korea Selatan. Sebelumnya ketika melalui rute – rute perjalanan menuju Korea Selatan, para pembelot Korea Utara memiliki status ilegal. Hal tersebut terjadi karena tidak ada negara yang dilalui oleh para pembelot Korea Utara yang mengakui keberadaan pembelot Korea Utara sebagai pengungsi. Maka dari itu, para pembelot Korea Utara memilih Korea Selatan sebagai negara tujuan utama untuk melanjutkan hidup yang lebih baik.

Setelah menjalani segala proses di tempat pendampingan masyarakat Korea Utara sudah berstatus sebagai pengungsi. Kehidupan setelah proses pendampingan tersebut adalah menjadi warga negara seutuhnya di Korea Selatan. Pemerintah memberikan sejumlah subsidi kepada pengungsi Korea Utara

untuk menjadi modal awal melakukan kegiatan sebagai warga negara. Tanpa ada persyaratan khusus, batas – batas tertentu ataupun peraturan tertentu untuk mempergunakan subsidi tersebut.

Kebijakan politik dan situasi masyarakat Korea Utara dibawah masa kepemimpinan Kim Jong Un telah berbeda dengan masa pemerintahan sebelumnya. Karakteristik kepemimpinan Kim Jong Un yang keras dan sangat revolusioner membuat perubahan terjadinya perbedaan motivasi begitupula dengan faktor pembelotan masyarakat Korea Utara. Keadaan yang berebda tersebut menjadi faktor – faktor terjadinya pembelotan dan telah membuat pembelotan disatu sisi menjadi terhambat namun terus terjadi. Sejumlah negara yang menjadi tujuan utama pembelotan masyarakat Korea Utara merupakan Cina dan Korea Selatan. Kedua negara tersebut terletak berdekatan secara geografis. Namun untuk dapat mencapai kedua negara tersebut membutuhkan waktu dan proses yang panjang dan berat. Korea Selatan sebagai negara yang bersaudara dengan Korea Utara menjadi tujuan utama pembelotan masyarakat Korea Utara.

Peran penting Korea Selatan dalam membantu para pengungsi Korea Utara secara domestik juga terlihat ketika meloloskan dan merevisi kembali Undang-Undang Hak Asasi Manusia Korea Utara (*North Korean Human Rights Act*) pada tahun 2016 melalui *National Assembly* dibawah kepemimpinan Park Geun Hye (Choi, 2018). Kemudian institusionalisasi isu hak asasi manusia Korea Utara juga dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan bekerjasama dengan pihak internasional juga merupakan kontribusi yang sangat berpengaruh dalam mendukung gerakan dan inisiatif untuk membela keadaan hak asasi para pembelot Korea Utara. Kontribusi pemerintah Korea Selatan terhadap masyarakat Korea Utara yang membelot diberikan secara moral maupun politis.

Di Korea Selatan para pembelot menjadi individu bebas yang tentunya menghadapi proses adaptasi yang sulit untuk kehidupan dan budaya yang baru. Para pembelot merasa belum terbiasa dengan kebebasan baru yang ditemukan. Modernitas Korea Selatan dan segala pilihan yang mereka miliki untuk menjalani kehidupan baru. Saat tiba dan menjalani proses berdaptasi di Korea Selatan, para pembelot Korea Utara mengalami berbagai macam tantangan dan kesulitan. Walaupun begitu pemerintah Korea Selatan meberika sejumlah bantuan dan pendampingan untuk membantu adaptasi pembelot Korea Utara di Korea Selatan. Perjalanan yang ditempuh hingga mencapai Selatan tidak secara instan memberikan kenyamanan bahkan kesejahteraan bagi para migran Korea Utara, karena Korea Selatan merupakan perkumpulan komunitas masyarakat yang sangat berbeda (Ji Seong Ho, 2016). Keterbatasan transisi dari sumber daya manusia yang diperoleh di Korea Utara dan persepsi masyarakat Korea Selatan terhadap pembelot Korea Utara menyebabkan kesulitan dalam proses adaptasi kehidupan di Korea Selatan (Yoon I.-J. , 2001).

Hal itu terlihat ketika para pengungsi Korea Utara tiba di Selatan mereka harus benar-benar dapat memahami bagaimana kebiasaan masyarakat di Korea Selatan, bahkan harus mulai mempelajari banyak sesuatu yang baru dari awal yang belum pernah diketahui sebelumnya agar supaya mereka dapat mencocokkan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut. Walaupun begitu, Korea Selatan masih tetap menjadi tujuan utama bagi para pembelot untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman sebagai individu dengan hak-hak dan kebebasannya.

Berdasarkan pada *2016 Unification Attitude Survey of North Korean Refugees* menyatakan bahwa 76.1% menyatakan bahwa mereka merasa puas dengan kehidupan Korea Selatan (Sangat puas: 49.3% + puas 26.8%) (Choi, 2018). Sementara survei daripada *The Korea Hana Foundation* (KHF) juga mengindikasikan 67% persen dari responden yang puas dengan kehidupan di Korea Selatan, menunjukkan kemampuan perlindungan dan dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Korea Selatan dalam membantu masa transisi pembelot Korea Utara di Korea Selatan (Choi, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa pembelot Korea Utara masih bisa melakukan adaptasi hingga menjalani kehidupan selayaknya warga negara di Korea Selatan. Pemerintah Korea Utara memberikan pelayanan secara khusus bagi para pembelot Korea Utara. Sementara kelompok pengungsi Korea etnis lain seperti Cina Korea dan Asia Tengah dari etnis Korea tidak mendapatkan penyediaan dan fasilitas seperti yang pembelot Korea Utara dapatkan. Para pembelot Korea Utara memperoleh hak kewarganegaraan langsung saat kedatangan dan menerima dana untuk pemukiman, sewaan apartemen secara permanen, dan bentuk dukungan lainnya (Chung B.-H. , 2014).

Survey oleh *Korea Hana Foundation* (KHF) pada tahun 2017 menunjukkan bahwa pembelot Korea Utara di Korea selatan mengalami kesulitan ekonomi, persepsi negatif, dan diskriminasi sosial oleh masyarakat Korea Selatan. Menurut Andrei Lankov, dalam bukunya menyatakan sebuah proses transisi tidaklah selalu lancar dan mudah (Choi, 2018). Walaupun kedua Korea memiliki karakter budaya dan bahasa yang sama, namun setelah adanya pembagian dua wilayah Utara dan Selatan menjadi dua sistem yang berbeda bukan berarti mudah bagi para migran Korea Utara untuk secara instan mampu beradaptasi dengan modernisasi yang telah terjadi di Korea Selatan.

Kesimpulan

Penelitian ini telah menemukan bahwa faktor pembelotan masyarakat Korea Utara dibawah kepemimpinan Kim Jong Un telah semakin beragam. Walaupun jumlah pembelotan yang menurun karena kerasnya aturan dan kebijakan kepemimpinan Kim Jong Un, pembelotan masih terus terjadi dengan factor-faktor yan makin beragam. Korea Utara merupakan sebuah negara otoriter yang terletak di wilayah Semenanjung Korea. Negara ini dikenal dengan program pengembangan senjata nuklir terbesar di dunia. Hal ini terlihat dari kondisi ekonomi, sosial, dan keadaan politik internal Korea Utara yang tidak stabil dan tidak memihak terhadap rakyatnya. Oleh karena ketidakstabilan tersebut cenderung menyebabkan pergerakan atau perpindahan masyarakat Korea Utara sejak masa akhir Perang Dingin ke beberapa negara terdekat seperti Cina, Rusia, dan Korea Selatan.

Perang Korea yang terjadi pada tahun 1950 di Semenanjung Korea disebabkan oleh perbedaan ideologi dan manuver dukungan blok sosialis dan blok liberalis. Wilayah Korea Utara pada saat itu mendapatkan dukungan dari Rusia dan Cina, sementara Korea Selatan mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat. Akibatnya banyak warga masyarakat Semenanjung Korea melakukan perpindahan baik di Utara dan Selatan untuk mencari perlindungan dari gencatan senjata antara dua wilayah tersebut. Perang Korea berakhir pada tahun 1953 ditandai dengan perjanjian penghentian aksi genjatan senjata dan pembentukan wilayah normalisasi bernama *Demilitarized Zone* (DMZ).

Setelah itu pada awal tahun 1990-an Korea Utara dilanda dengan adanya bencana alam kekeringan yang berkepanjangan hingga tahun 1998. Peristiwa yang dinamakan dengan *Great Famine* ini menyebabkan hampir 3 juta orang masyarakat Korea Utara meninggal karena kelaparan. Kelaparan besar di seluruh wilayah juga terjadi akibat ketidak-mampuan pemerintah dalam menanggulangi dampak dari bencana kekeringan tersebut. Hal ini disebabkan oleh krisis ekonomi yang paling besar di Korea Utara yang merugikan masyarakat dan pemerintahnya. Krisis ekonomi yang dilanda Korea Utara juga akibat dari berhentinya bantuan pasokan makanan dari Cina dan Rusia.

Pembelotan masyarakatnya mulai signifikan terjadi ketika masa Perang Korea. Pembelotan masyarakat Korea Utara pada awalnya dilatarbelakangi oleh peristiwa konflik dan bencana alam. Krisis ekonomi negara dilanjutkan dengan terjadi bencana kekeringan berkepanjangan juga memberikan dampak buruk bagi masyarakat Korea Utara. Sejak saat itu banyak masyarakat Korea Utara memutuskan untuk meninggalkan Korea Utara dengan berpindah ke wilayah yang lebih aman.

Pada tahun 2011 Kim Jong Un diumumkan sebagai penerus kepemimpinan rezim Kim setelah ayahnya Kim Jong Il. Semenjak menjabat sebagai pemimpin *Korea's Worker Party* dan pemerintahan, Kim Jong Un telah memperlihatkan orientasi kepemimpinannya dan karakter pemerintahannya. Orientasi pemerintahan Kim Jong Un mengutamakan pembangunan proyek pengembangan senjata nuklir dan memperkuat legitimasi kepemimpinan rezim di Korea Utara. Hal itu dilakukan dengan meningkatkan kebijakan – kebijakan politik internal dan sipil Korea Utara.

Situasi Korea Utara yang terjadi selama 8 - 10 tahun terakhir sangat berbeda dengan kondisi pada masa perang. Walaupun angka pembelotan yang secara perlahan menurun karena kebijakan Kim Jon Un yang semakin ketat, tidak menutup kemungkinan hal tersebut hanya menghambat bukan berarti menghentikan fenomena pembelotan atau *border-crossing* masyarakat Korea Utara. Munculnya gelombang pembelotan masyarakat Korea Utara dalam fase dan masa yang berbeda menciptakan motivasi dan alasan yang berbeda - beda pula.

Fenomena pembelotan masyarakat Korea Utara tidak terjadi begitu saja. Terdapat banyak alasan – alasan yang melatarbelakangi keputusan pembelotan masyarakat Korea Utara ke Korea Selatan khususnya sejak Kim Jong Un mengambil alih pemerintahan. Sebelumnya latar belakang masyarakat membelot karena konflik, bencana, dan krisis ekonomi. Karena keadaan tersebut mengharuskan masyarakat untuk berpindah agar dapat bertahan hidup. Namun alasan tersebut menjadi berbeda dalam kurun 10 tahun terakhir, terutama sejak Kim Jong Un mengambil alih pemerintahan.

Di Korea Utara juga terdapat klasifikasi sistem kasta yang menggolongkan setiap individu kedalam tiga tingkatan. Tiga kategori tersebut merupakan; (I) kelas utama atau *Core Class* yang terdiri dari individu atau keluarga yang memperjuangkan negara seperti revolusioner, pahlawan, keluarga non-kombatan dan tentara yang gugur pada saat Perang Korea (II) kelas menengah atau *Wavering Class* yang terdiri dari komponen – komponen warga negara termasuk keluarga dan keturunannya yang mengkhianati negara dan membelot ke negara lain, dan (III) adalah kelas paling bawah atau *Hostile Class* yang terdiri dari warga negara yang mendukung Jepang atau Amerika, masyarakat yang kapitalis, dan mata – mata terhadap negara.

Sementara itu adanya sistem *Songbun* di Korea Utara menciptakan sistem ekonomi yang tidak merata oleh pemerintah. Sebelum Kim Jong Un mengambil alih kepemimpinan, di Korea Utara berlaku sistem rasio yang mengatur pendistribusian secara merata bagi seluruh masyarakat Korea Utara. Namun sejak Kim Jong Un mengambil kepemimpinan, alih sistem rasio sudah tidak berlaku secara efektif bahkan

telah hilang. Hal tersebut terjadi karena elit penguasa yang berdomisili di Pyongyang mengatur sistem tersebut dengan mengutamakan orang – orang yang berada di Pyongyang.

Menurut penulis dengan menggunakan analisa teori *Push Pull Factors*, penulisan ini dapat mengklarifikasikan faktor – faktor pembelotan yang dilakukan masyarakat Korea Utara dibawah kepemimpinan Kim Jong Un. Dua hal utamanya yang membedakan fenomena pembelotan dibawah masa kepemimpinan Kim Jong Un yaitu dorongan karena ketakutan (*Fear*) dan tarikan karena mencari kebebasan (*Freedom*).

Berikut daftar faktor dorongan (*push*) dan faktor tarikan (*pull*) terjadinya pembelotan pada masa kepemimpinan Kim Jong Un;

Gambar 5. 1 Tabel perbedaan faktor pembelotan pada masa Kim Jong Un dan Sebelumnya

Faktor Pembelotan	Sebelum Kim Jong Un	Masa Kim Jong Un
1. <i>Push Factor</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pendudukan kekuatan blok besar di Utara dan Selatan yang membuat sebagian masyarakat meninggalkan wilayahnya baik dari Utara ke Selatan dan sebaliknya karena tidak mendukung ideologi • Perang dan Konflik, intervensi kedua kekuatan blok Soviet dan Amerika sehingga memecahkan peran anatar wilayah Utara dan Selatan yang membahayakan keselamatan warga sipil atau masyarakat biasa, sehingga memutuskan untuk mencari tempat yang lebih aman di beberapa wilayah seperti Cina, Rusia, dan Jepang. Bahkan beberapa terban ke Amerika melalui relasi anggota militer • Bencana alam yaitu kekerinan dan kemarau panjang terlama yang pernah dialami Korea Utara. Sehingga memaksa masyarakat melintasi wilayah perbatasan untuk mencari pasokan makanan dan bantuan di wilayah lain seperti Cina yang sangat 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan hak-hak dasar manusia • Hukuman dan sanksi politik terhadap yang berlaku untuk seluruh kerabat keluarga • Penerapan system kelas social (<i>Songbun System</i>) yang berdampak bagi kesetaraan ekonomi • Tingkat suap dan korupsi yang semakin tinggi sehingga mendorong masyarakat untuk membelot dengan membayar petugas atau penjaga • Perkembangan generasi <i>Jangmadang</i>, yaitu generasi yang berorientasi pada sistem pasar(kapitalis) dan kepercayaanya terhadap rezim yang berkurang.

2. <i>Pull Factor</i>	berdekatan dengan perbatasan Korea Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Kemunculan kegiatan pasar ilegal (<i>Black Market</i>) • Masuknya aliran informasi melalui arus pergerakan lintas batas negara yang terus terjadi termasuk • informasi mengenai fasilitas dan perlindungan yang tersedia di Korea Selatan
-----------------------	--	---

Jika dilihat dari situasi sebelum Kim Jong Un memimpin, masyarakat Korea Utara cenderung melakukan perpindahan atau *border-crossing* karena kekurangan sumber makanan dan kebutuhan terhadap sumber pendapatan untuk menunjang kondisi ekonominya. Namun faktor-faktor baru yang ternyata muncul di masa kepemimpinan kepeminnan Kim Jong Un memeperlihatkan adanya *shift* atau perubahan motivasi pembelotan oleh masyarakat Korea utara ke Korea Selatan.

Terlihat jelas bahwa faktor-faktor yan mendorong dan menarik masyarakat Korea Utara di masa kepemimpinan Kim Jong Un berbeda. Faktor-faktor yan disebabkan oleh perubahan iklim politik dan juga kebijakan internal Kim Jon Un terhadap negara dan rakyatnya. Masyarakat Korea Utara yang mulai terpapar dengan bantuan dan informasi dunia luar menyadari kebenaran propaganda yang selama ini disebarkan dan diajarkan oleh rezim.

Perubahan tersebut juga terlihat dari latar belakang pembelot masyarakat Korea Utara diatandai dengan karakteristik masyarakat yang tiba di Korea Selatan. Karakteristik seperti orientasi sosial atau latar belakang pekerjaan pembelot Korea Utara yang bervariasi sejak tahun 2012 menunjukkan adanya perubahan latar belakang. Sejak masa pasca Perang Korea banyak pembelot yang berdatangan berasal dari kalangan elit pemerintahan seperti diplomat, pejabat pemerintahan, akademisi, hingga aparat militer. Namun setelah tahun 2011 tepatnya setelah masa reformasi ekonomi oleh Kim Jong-Un, latar belakang pembelot yang tiba di Korea Selatan berubah menjadi buruh, akademis, bahkan pengangguran.

Korea utara dengan sistem pemerintahan yang ototr iter meberlakukan sejumlah kebijakan politik yang mengatur seluruh kehidupan masyarakat. Seperti kebijakan yang mengontrol gerak –gerik masyarakat Korea Utara, peningkatan pengawasan pemerintah di wilayah perbatasan, hingga sanksi dan hukuman bagi masyarakat yang melanggar aturan dan melakukan perbuatan ilegal. Sejumlah masyarakat Korea Utara merasakan ketakutan terhadap peraturan rezim hingga mengancam kenyamanan kehidupan sehari – hari masyarakat Korea Utara.

Karakter kepemimpinan Kim Jong Un yang keras tidak hanya berlaku bagi masyarakat biasa, namun juga bisa berlaku bagi orang – orang terdekatnya yang suatu waktu memiliki pemikiran dan

pandangan yang berbeda mengenai rezim pemerintahan. Hal ini dilakukan Kim Jong Un untuk mendapatkan legitimasi kepemimpinan yang maksimal dengan mengontrol seluruh kebijakan baik politik maupun sosial.

Kebijakan – kebijakan internal pemerintah Korea Utara yang berupa kebijakan politik dan ekonomi mendorong masyarakat Korea Utara untuk membelot. Kebijakan yang tentunya tidak memihak masyarakat dan menyudutkan masyarakat Korea Utara terutama yang termasuk kedalam kelas paling rendah. Kebijakan – kebijakan tersebut juga terus meningkatkan rasa kecewa dan tidak percaya masyarakat terhadap rezim. Munculnya generasi *Jangmadang* juga sangat kuat pengaruhnya, generasi yang tidak lagi meletakkan atau menggantungkan hidupnya pada sistem dan peraturan pemerintah menjadi mandiri dan lebih berani terhadap rezim.

Kebijakan kontrol dan pengawasan perbatasan yang diperketat itu tidak menghetikan kegiatan pembelotan ataupun menghentikan perubahan – perubahan yang terjadi di kalangan masyarakat Korea Utara. Ini dibuktikan dengan masih terdapatnya aktifitas pembelotan dan perubahan masyarakat di dalam Korea Utara sendiri. Selain itu inefektivitas sistem sosial di Korea Utara yang meningkat disebabkan oleh kekuasaan elit politik yang secara sosial dan ekonomi mendiskriminasikan masyarakat kelas rendah.

Keberadaan tabel diatas berujuan untuk memperlihatkan bahwa pembelotan masyarakat Korea Utara ini masih terus terjadi walau dalam jumlah yang kecil. Perubahan factor dan motivasi yang disebabkan oleh akses dan perubahan mengakar yang terjadi di kalangan masyarakat Korea Utara dipercaya akan membawa perubahan dalam konteks sosio-kultural masyarakat Korea Utara sendiri. Masyarakat Korea Utara yang mulai terekspos dengan dunia luar mulai menyadari propaganda dan sedikit demi sedikit menerapkan karakter yang tidak sepenuhnya mempercayai pemerintah rezimnya.

Faktor – faktor yang menimbulkan adanya motivasi pembelotan masyarakat korea Utara dalam waktu 10 tahun terakhir juga merupakan efek samping dari iklim kebijakan pemerintah Korea Utara. Kebijakan politik dan ekonomi Korea Utara yang represif dan sulit untuk di prediksi membuat masyarakat berinisiatif untuk membelot. Kim Jong-Un selama pemerintahannya telah melakukan banyak pertemuan dengan pemimpin – pemimpin negara besar, Namun dalam pertemuan tersebut isu kemanusiaan masyarakat Korea Utara tidak menjadi prioritas diskusi. Hal tersebut menjadikan fenomena pembelotan masyarakat Korea Utara ke Selatan ini mendapatkan sedikit perhatian masyarakat internasional pada awalnya. Namun setelah sekian jumlah masyarakat Korea Utara yang tiba di Korea Selatan secara tidak langsung telah mengubah pandangan masyarakat internasional terhadap keadaan sebenarnya di Korea Utara.

Selain mendapatkan perhatian masyarakat internasional, fenomenan pembelotan masyarakat Korea Utara ini juga akan memancing perubahan secara perlahan di kalangan masyarakat Korea Utara. Dengan ini berbagai macam tantangan yang lebih besar akan mengganggu ketahanan dan konsistensi rezim mempertahankan Korea Utara dari pengaruh – pengaruh dunia luar. Di sisi lain, berdasarkan analisa *push – pull factors*, pembelotan masyarakat Korea Utara tersebut akan terus menjadi kontribusi utama dalam mendorong atau menarik masyarakat Korea Utara untuk membelot.

DAFTAR PUSTAKA

- (CSIS), C. f. (2018, November 6). *CSIS (Center for Strategic & International Studies)*. Retrieved April 24, 2019, from [www.csis.org](https://www.csis.org/analysis/difficulties-defectors-era-rapprochement-north-korea): <https://www.csis.org/analysis/difficulties-defectors-era-rapprochement-north-korea>
- Agency, C. I. (2018). *The World Factbook: Central Intelligence Agency*. Washington: www.cia.gov.
- Agency, T. Y. (2019, Oktober 16). *Headlines: North Korean Defectors*. Retrieved Oktober 17, 2019, from Yonhap News Agency: m-en.yna.co.kr/view/AEN20191016007900315?section=news
- Baek, J. (2016). *North Korea's Hidden Revolution: How the Information Underground is Transforming the Closed Society*. London: Yale University Press.

- Baek, J. (2017, February 05). *Essay Foreign Affairs*. Retrieved June 17, 2019, from The Opening of the North Korean Mind: <https://www.foreignaffairs.com/articles/north-korea/2016-11-28/opening-north-korean-mind>
- Baek, J. (2017, February 05). *Essay: Foreign Affairs*. Retrieved June 17, 2019, from The Opening of the North Korean Mind: <https://www.foreignaffairs.com/articles/north-korea/2016-11-28/opening-north-korean-mind>
- Barnett, M. (2014). Refugees and Humanitarianism. In G. L. Elenan Fiddian-Qamisyeh, *The Oxford Handbook of Refugee and Forced Migration Studies* (pp. 241-252). Oxford: Oxford University Press.
- Barron, L. (2019). *Materialism Will One Day Bring Changes in North Korea*. Taipei: Time News.
- Bell, S., Alves, S., de Oliveira, E., & Zuin, A. (2010). *Migration and Land Use Change in Europe: A Review*. . England: Living Reviews in Landscape Research.
- Benhabib, S. (1986). *Critique, Norm and Utopia: A Study of the Foundations of Critical Theory*. New York: Columbia University Press.
- Bennett, B. W. (2013). Possibilities for Collapse. In B. W. Bennett, *Preparing for the Possibility of a North Korean Collapse* (pp. 13-52). New York: RAND Corporation.
- Bidet, E. (2009). Social Capital and Work Integration of Migrants: The Case of North Korean defectors in South Korea. *Asian Perspective, Vol 33, No 2*, 151-179.
- Byeong-Seung, P. (2018). "North Korea defector numbers drop under Kim". Seoul, Asia: BBC News.
- Byeong-Seung, P. (2018). *North Korea defector numbers drop under Kim*. Seoul, Asia: BBC News.
- Byeong-Seung, P. (September 2018). "North Korea defector numbers drop under Kim". Seoul, Asia: BBC News.
- Chang, Y., Heggard, S., & Noland, M. (2008). Migration Experiences of North Refugees: Survey from China. *Working Paper Series 8*, 1-26.
- Choi, G. (2018). North Korean Refugees in South Korea: Change and Challenge in Settlement Support Policy. *The Korean Journal of International Studies vol.16, No. 1*, 77-98.
- Choi, G. (2018). North Korean Refugess in South Korea: Change and Challenge in Settlement Support Policy. *The Korean Journal of International Studies Vol, 16, No. 1*, 77-98.
- Chung, B.-H. (2008). Between Defector and Migrant: Identities and Strategies of North Korean in South Korea. *Korean Studies, Vol. 32* , 1-27.
- Chung, B.-H. (2014). North Korean Refugees As Penetrant Transnational Migrants. *Urban Anthropology and Studies of Cultural System and World Economic Development, Vol. 43, No. 4 Special Issue: Emigration and Immigration: The case of South Korea*, 329-361.

- Coduti, M. R. (2016, Desember 16). *Kim Jong Un's North Korea: Leadership Changes Under the New Leader*. Retrieved Juli 06, 2019, from nknews.org: <https://www.nknews.org/2016/12/kim-jong-uns-north-korea-leadership-changes-under-the-new-leader/>
- Cohen, G. (2003). *"Facts and Principles"*. *Philosophy and Public Affairs*. Princeton University Press.
- Cohen, R. (2011, September 20). *Brookings*. Retrieved Maret 20, 2019, from www.brookings.edu: <https://www.brookings.edu/opinions/admitting-north-korean-refugees-to-the-united-states-obstacles-and-opportunities/>
- CSIS, C. f. (2018, November 6). *CSIS (Center for Strategic & International Studies)*. Retrieved April 24, 2019, from www.csis.org: <https://www.csis.org/analysis/difficulties-defectors-era-rapprochement-north-korea>
- Dyer, H. C. (1997). *Moral Order/World Order: The Role of Normative Theory in the Study of International Relations*. New York: The Ipswich Book Company Ltd.
- Editors, H. (2018, August 21). *THE HISTORY*. Retrieved May 1, 2019, from www.history.com: <https://www.history.com/topics/korea/demilitarized-zone>
- Fathoni, R. S. (2017, Oktober 28). *Wawasan Sejarah*. Retrieved April 28, 2019, from www.wawasansejarah.com: <https://wawasansejarah.com/perang-korea/>
- Ford, G. (2018). *Talking to North Korea: Ending the Nuclear Standoff*. London: The Pluto Press.
- Gauthier, B. K. (2015, September 18). *Foreign Policy Journal:Asia Pacific, United State*. Retrieved Juli 04, 2019, from www.foreignpolicyjournal.com: <https://www.foreignpolicyjournal.com/2015/09/18/the-coming-civil-war-in-north-korea/>
- Habib, B. (2008). *Another perfect storm? Predictors of Radical Change in North Korea*. South Korea: Institute for Regonal Security.
- Haggard, S. (2004). *Famine in North Korea: Markets, Aids, and Reforms*. New York: Columbia University Press.
- Harden, B. (2010). *Dear Leader Appears to be Losing North Koreans' Hearts and Minds*. New York: Washington Post.
- Harden, B. (2012). *Escape from Camp 14*. New York: The Penguin Group.
- Herald, K. (2010, Februari 10). *National: Food Shortages Worsens in North Korea*. Retrieved Juli 06, 2019, from www.koreaherald.com: http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20130602000090&ACE_SEARCH=1
- Herald, K. (2013, Juni 2). *National: North Korean Farmers Planting Rice with Profits in Mind*. Retrieved Juli 06, 2019, from www.koreaherald.com: http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20130602000090&ACE_SEARCH=1

- Hyug-Baeg Im, Bae-HO Hahn, Chan Lee, Young Ick Lew, Wong-ik Yu. (2019, February 21). *Encyclopedia Britannica*. Retrieved February 25, 2019, from www.britannica.com: <https://www.britannica.com/place/South-Korea>
- Institute, T. G. (2014). *U.S.-Based North Korean Refugee*. Dallas, Texas: www.bushcenter.org.
- Ji, D. (2019). *South Korea Admits to failure in handling of North Korean sailor defection case*. Seoul: NKNEWS.ORG.
- Ji, D. (3 Juli, 2019). *South Korea Admits to failure in handling of North Korean sailor defection case*. Seoul: NKNEWS.ORG.
- Kawashima, D. T. (2002). *The Exodus from North Korea*. Tokyo: Life Funds for North Korean Refugees.
- Kay, J. (2014, October 15). *A Shocking Expose of the Power Behind North Korea's Kim Dictatorship*. Retrieved June 24, 2019, from Foundation for Defense of Democracies: <https://www.fdd.org/analysis/2014/10/15/a-shocking-expose-of-the-power-behind-north-koreas-kim-dictatorship/>
- Kim, J. (2019). *Citizenship is a Privilege, Not a Right*. Washington DC: www.bushcenter.org.
- Kim, S. H. (2012). *Conceptualization of Organizational Empowerment: A Study of North Korean Refugee Organisation*. Boston: School of Social Work, Boston University.
- Kim, Y. G. (2015). *The Odyssey of North Korean Defectors*. New York: City University of New York Academic Works.
- King, R. R. (2018, November 6th). *Center for Strategic & International Studies*. Retrieved March 9th, 2019, from www.csis.org: <https://www.csis.org/analysis/difficulties-defectors-era-rapprochement-north-korea>
- King, R. R. (2018, July 12). *Congress Affirms Concern for North Korea Human Rights: Extends Human Rights Act*. Retrieved April 16, 2019, from www.csis.org: <https://www.csis.org/analysis/congress-affirms-concern-north-korea-human-rights-extends-human-rights-act>
- Ko, S. H., Chung, K., & Seok Oh, Y. (2004). North Korean Defectors: Their Life and Well-Being After Defection. *Asian Perspective*, Vol. 28, No. 2, 65-99.
- Koh, B. (1993). The War's Impact on the Korean Peninsula. *The Journal of American-East Asian Relations*, Vol.2, No. 1, 57-76.
- Koh, D.-W. (2004). Dynamics of Inter-Korean Conflict and North Korea's Recent Policy Changes: An Inter Systemic View. *Asian Survey*, Vol. 44, No. 3, 422-441.
- Koh, D.-W. (June 2004). Dynamics of Inter-Korean Conflict and North Korea's Recent Policy Changes: An Inter Systemic View. *Asian Survey*, Vol. 44, No. 3, 422-441.
- Kopf, D. (2018, Juni 11). *Quartz: Northern Promises*. Retrieved Juli 06, 2019, from Quartz.com: <https://qz.com/1300685/the-state-of-the-north-korean-economy-might-surprise-you/>

- Korea, L. i. (2017). *North Korea 101: A Changing North Korea*. Long Beach, California: www.libertyinnorthkorea.org.
- Korea, T. N. (2018). *North Korea in The World: North Korea External Relations*. Retrieved Maret 12, 2019, from www.northkoreaintheworld.org: <https://www.northkoreaintheworld.org/multilateral/international-treaties>
- Kujath, P., & Robina, Z. (2010, April 23). *DW Beranda: Dunia*. Retrieved 07 06, 2019, from DW.com: <https://www.dw.com/id/reformasi-mata-uang-perburuk-pasokan-pangan-korut/a-5500320>
- Lankov, A. (2013). *The Real North Korea: Life and Politics in the Failed Stalinist Utopia*. New York: Oxford University Press.
- Lee, E. S. (1966). A Theory of Migration. *Demography*, Vol. 3, No. 1, 47-57.
- LiNK, T. L. (2018, July 18). *North Korea 101: A Changing North Korea*. Retrieved May 9, 2019, from Liberty in North Korea: <https://www.libertyinnorthkorea.org/learn-a-changing-north-korea/>
- Maresca, T. (2017, September 5). *USA TODAY: NEWS*. Retrieved May 16, 2019, from www.usatoday.com: <https://www.usatoday.com/story/news/world/2017/09/05/north-korea-defectors-provide-rare-glimpse-isolated-life/625916001/>
- Mauna, P. B. (2015). *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: P.T. ALUMNI.
- McCurry, J. (2014). *The Defector who wants to go back to North*. Seoul: The Guardian.
- Millet, A. R. (2019, March 14). *ENCYCLOPEDIA BRITANICA*. Retrieved May 1, 2019, from www.britannica.com: <https://www.britannica.com/event/Korean-War>
- Min, P. G. (2011). *Korean's Immigration to the U.S.: History and Contemporary Trends*. New York: The Research Center for Korean Community Queens College of CUNY.
- Min-Ki, K. (2019, April 30). Meet the Man Who Rescued 6,000 North Korean Defector. (A. Boss, Interviewer)
- MOU, M. o. (2019). *Policy on North Korean Defectors*. Seoul: www.unikorea.go.kr.
- Mundi, T. I. (n.d.). *Index Mundi*. Retrieved Maret 12, 2019, from www.indexmundi.com: <https://www.indexmundi.com/factbook/compare/south-korea.north-korea>
- Myong-Hyun, G. (2017). *South Korean Policy on Human Rights in North Korea After the Political Change*. Seoul: Hurights Osaka.
- Neething, T. (2004). Some Practical Implications for Norm-based and value-based scholarly Inquiry. *The Development of Normative Theory in International Relations*, 1-25.
- News, R. C. (2019, June 19). *BBC News: Asia*. Retrieved June 24, 2019, from www.bbc.co.uk: www.bbc.co.uk/news/amp/world-asia-48637518

- Newton, J. (2016, September 21). *Mail Online: News*. Retrieved Juli 06, 2019, from Daily Mail: <https://www.dailymail.co.uk/news/article-3799823/North-Korea-accidentally-leaks-details-propaganda-websites-allowing-people-West-access-them.html>
- Noland, M. (2010, Februari 8). *BBC News: Indonesia*. Retrieved Juli 06, 2019, from www.bbc.com: https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/02/100208_nkorea
- O'Carroll, C. (April 2014). *Engage or isolate? How the world should deal with North Korea, according to its citizens*. Seoul: The Guardian.
- Ortiz, E. (2018). *They escaped Kim Jong Un. Now these young North Korean defectors just want to grow up*. New Jersey, Washington: NBC News.
- Padden, B. (2017, January 26). *East Asia: North Korean Crumbling*. Retrieved June 17, 2019, from Voice of America Website: <https://www.voanews.com/east-asia/defector-north-korean-regime-crumbling>
- Pietrzyk-Reeves, D. (2017). Normative Political Theory. *Teoria Polityki*, 173-185.
- Ramos, J. (2017, November 24). *Science Trends*. Retrieved May 07, 2019, from www.sciencetrends.com: <https://sciencetrends.com/politics-economics-influence-push-pull-factors-migration/>
- Sang-Hun, C. (2017). *North Korean Defector Says Kim Jong-Un's Control is Crumbling*. New York: New York Times.
- Sang-Hun, C. (25 January 2017). *North Korean Defector Says Kim Jong-Un's Control is Crumbling*. New York: New York Times.
- Seth, M. J. (2011). North Korea's 1990s Famine in Historical Perspective. *Food, Culture, and Asia: Education About Asia, Volume 16 No. 3, Winter*, 24-28.
- Suh, B.-H. (2007). Controversies Over North Korean Human Rights In South Korea Society. *Asian Perspective, Vol. 31, No. 2*, 23-46.
- Tanaka, H. (2008). *North Korea: Understanding Migration to and from a Closed Country*. Washington DC: Migration Policy Institute.
- Team, A. I. (2014, February 14). *News: Why The New Investigation into North Korean Human Rights Violations Matters*. Retrieved May 07, 2019, from Amnesty International: <https://www.amnestyusa.org/why-the-new-investigation-into-north-korean-human-rights-violations-matters/>
- Team, L. (2019). *About: Why This NGO Was Founded*. Retrieved from northkoreanrefugees.com: <http://www.northkoreanrefugees.com/about/>
- Tong-Hyung, K. (2019). *UN investigators says North Korea crating down on escapees*. London: Kim Tong-Hyung Associated Press.
- Turku, H. (2009). *Isolationist States in Interdependent World*. Florida, USA: Ashgate Publishing Company.

- USA, N. (2018). *Resettlement: Refuge Resettlement Assistance Program*. Washington DC: www.nkinusa.org.
- Watch, H. R. (January 2017). *North Korea*. New York: Human Rights Watch.
- Wee, H. (November 12, 2014). *News: CNBC*. Seoul: www.cnn.com.
- Wickramasinghe, A., & Wimalaratana, W. (Fall 2016). International Migration and Migration Theories. *Social Affairs: A Journal for the social Sciences Vol.1 No.5*, 13-32.
- Yoon, I.-J. (2001). North Korea Diaspora: North Korean Defectors Abroad and in South Korea. *Development in Society* 30, 1-26.
- Yoon, I.-J. (2001). North Korean Diaspora: North Korean defectors Abroad and in South Korea. *Development and Society, Vol. 30, No. 1*, 1-26.
- Yoon, J. (September 2018). *A Cage Without Walls: Once in South Korea, North Koreans Have little chance of getting asylum elsewhere*. Canada: CBC News.
- Young, L. (2017, November 14). *Global News*. Retrieved June 13, 2019, from North Korea Defector: Global News: <https://globalnews.ca/news/3859804/how-many-north-korean-defectors/>